

KEPEMIMPINAN DAN GOVERNANCE DALAM MENGATASI KETIMPANGAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI DAERAH 3T

Arief Tirtana

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Lakbok

Email: tirtana333@gmail.com

Abstract

The disparity in the competence of Islamic Education (PAI) teachers in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions remains a major challenge in Indonesian education. Based on data from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology in 2023, there is a shortage of 30% of permanent teachers, with the highest proportion in 3T regions. This disparity impacts the quality of learning and the achievement of national education goals. This article aims to examine the strategic role of educational leadership and governance in addressing this disparity. The research uses a qualitative approach with literature review and policy analysis. The results of the study indicate that transformative leadership and collaborative governance across sectors are essential for the equitable distribution of PAI teacher competencies. Key recommendations include strengthening continuous training, redistributing teachers based on regional needs, and integrating inter-ministerial programmes to improve the quality of religious education in 3T regions.

Keywords: Educational leadership, governance, PAI teachers, competencies, 3T regions

Abstrak

Ketimpangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat kekurangan guru tetap sebesar 30%, dengan proporsi tertinggi berada di wilayah 3T. Kesenjangan ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis kepemimpinan pendidikan dan tata kelola (governance) dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformatif serta tata kelola kolaboratif antarsektor sangat diperlukan untuk pemerataan kompetensi guru PAI. Rekomendasi utama mencakup penguatan pelatihan berkelanjutan, redistribusi guru berbasis kebutuhan daerah, serta integrasi program lintas kementerian untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di wilayah 3T.

Kata kunci: Kepemimpinan pendidikan, governance, guru PAI, kompetensi, daerah 3T

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis tidak hanya dalam mentransmisikan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga dalam membentuk karakter, moralitas, dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks pendidikan nasional, PAI menjadi fondasi penting untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Namun demikian, pemerataan kualitas pendidikan PAI di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang seringkali terabaikan dalam distribusi sumber daya pendidikan.

Berdasarkan data Kemendikbudristek (2023), Indonesia mengalami kekurangan guru tetap sebesar 30%, dengan kekosongan tertinggi berada di wilayah 3T. Kekurangan ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga menyangkut kualitas dan kompetensi guru yang tersedia. Ketidakseimbangan distribusi guru menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan optimal, sehingga berdampak pada pencapaian kompetensi siswa, khususnya dalam aspek religius dan pembentukan karakter. Situasi ini memperlemah fungsi strategis PAI sebagai instrumen penguatan moral bangsa, khususnya di wilayah-wilayah yang justru sangat memerlukan penguatan nilai-nilai tersebut.

Lebih lanjut, keterbatasan akses terhadap pelatihan, bimbingan teknis, dan sumber daya pembelajaran yang memadai semakin memperparah kondisi tersebut. Guru PAI di daerah 3T kerap mengalami kesulitan dalam mengakses program pengembangan profesional berkelanjutan seperti PPG Dalam Jabatan, terutama karena kendala infrastruktur digital dan geografis. Akibatnya, terdapat kesenjangan kompetensi antara guru di wilayah perkotaan dan mereka yang bertugas di daerah terpencil, baik dalam hal pedagogik, sosial, maupun teknologi pembelajaran.

Di tengah berbagai tantangan yang melingkupi pemerataan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI), peran kepemimpinan pendidikan dan tata kelola (governance) menjadi elemen kunci yang sangat menentukan keberhasilan upaya perbaikan. Kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak transformasi pendidikan, terutama dalam menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan geografis di wilayah 3T. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah, tidak responsif terhadap kondisi lokal, serta tata kelola yang terfragmentasi antarlembaga dapat memperparah kondisi ketimpangan, terutama dalam hal kompetensi guru dan akses terhadap pengembangan profesional.

Ketiadaan arah yang jelas dalam pembinaan guru, kurangnya regulasi terpadu, dan minimnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan menyebabkan berbagai program peningkatan mutu guru berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, banyak guru PAI di daerah terpencil yang terabaikan dari program pelatihan, supervisi, dan insentif, yang sebenarnya sangat mereka butuhkan. Dalam konteks ini, governance yang adaptif dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pendidikan agama yang adil dan inklusif.

Oleh karena itu, kajian strategis berbasis kepemimpinan dan tata kelola pendidikan sangat diperlukan. Kajian ini harus mampu memetakan aktor, mekanisme koordinasi, serta hambatan-hambatan struktural yang ada, sekaligus menawarkan solusi-solusi berbasis kebijakan yang bersifat kontekstual dan implementatif. Model kepemimpinan transformasional, instructional leadership, dan kolaborasi lintas sektor perlu diadopsi dan diperkuat dalam tata kelola pendidikan PAI di daerah 3T. Dengan demikian, perbaikan kualitas guru dan pemerataan akses pendidikan agama tidak hanya menjadi wacana, tetapi nyata diwujudkan melalui struktur dan sistem yang berpihak pada keadilan sosial.

METODOLIGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali, memahami, dan menganalisis secara mendalam berbagai tantangan dan solusi terkait kepemimpinan

pendidikan dan tata kelola (governance) dalam penguatan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi kompleksitas isu yang bersifat multidimensional dan kontekstual.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan pemerintah (Kemendikbudristek 2023), jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, regulasi perundang-undangan (Permendikbud, peraturan Kemenag), serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi dan kredibilitas data terhadap fokus kajian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis, yaitu dengan cara mendeskripsikan fenomena yang ditemukan dari sumber pustaka, lalu menganalisisnya secara kritis untuk mengidentifikasi pola, kelemahan, serta potensi perbaikan dalam sistem kepemimpinan dan tata kelola pendidikan PAI di wilayah 3T. Data kuantitatif seperti kekurangan guru berdasarkan wilayah (Kemendikbudristek, 2023) digunakan sebagai penguat narasi, sementara data kualitatif memberikan pemahaman kontekstual terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Kompetensi Guru PAI di Daerah 3T

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan guru di wilayah perkotaan atau pusat-pusat pendidikan. Keterbatasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rendahnya tingkat profesionalisme, keterbatasan infrastruktur, hingga minimnya dukungan kelembagaan. Salah satu permasalahan mendasar adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan profesi, seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang menjadi syarat penting dalam peningkatan kompetensi dan pengakuan profesi guru. Hambatan geografis, informasi yang terbatas, serta belum optimalnya kebijakan afirmatif membuat banyak guru PAI di wilayah 3T tertinggal dalam peningkatan kualitas diri.

Selain itu, fasilitas pembelajaran yang tidak memadai menjadi penghalang utama dalam penerapan metode pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Minimnya sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keterbatasan perangkat digital, serta buruknya akses internet memperparah kondisi tersebut. Banyak guru tidak mampu mengakses sumber belajar daring, pelatihan digital, atau platform pengembangan profesi secara mandiri. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya literasi digital di kalangan guru PAI, yang menyebabkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum optimal. Akibatnya, pembelajaran PAI menjadi monoton, kurang inovatif, dan sulit menjawab kebutuhan peserta didik yang hidup di era digital (Mulyasa, 2013).

Dampak dari ketimpangan ini sangat terasa dalam kualitas pembelajaran agama yang diterima oleh peserta didik. Ketika guru tidak dibekali dengan

keterampilan pedagogis yang mutakhir dan dukungan teknologi, maka penyampaian nilai-nilai agama yang seharusnya kontekstual dan menyentuh kehidupan sehari-hari menjadi tidak efektif. Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek seringkali tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal di daerah 3T karena tidak adanya sarana pendukung maupun kapasitas guru yang memadai.

Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi sistemik dan kolaboratif untuk mengatasi ketimpangan ini. Pemerintah perlu menyediakan sarana pembelajaran digital yang memadai, memperluas akses terhadap pelatihan berbasis hibrida yang ramah daerah 3T, serta memperkuat peran pengawas dan kepala sekolah dalam membina dan mendampingi guru secara berkelanjutan. Pendekatan pembinaan yang kontekstual, berbasis komunitas, dan adaptif terhadap budaya lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa guru PAI di daerah 3T tidak terus tertinggal, tetapi justru menjadi agen perubahan yang berperan besar dalam pembangunan karakter dan spiritualitas bangsa.

2. Kepemimpinan Pendidikan di Daerah 3T

Kepemimpinan sekolah yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dalam hal penguatan kompetensi guru. Penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kepemimpinan kepala sekolah dengan peningkatan kinerja dan motivasi guru, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran. Namun demikian, kondisi ini belum sepenuhnya tercermin di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di banyak sekolah di daerah tersebut, kepala sekolah masih menjalankan fungsi kepemimpinan secara administratif semata, terbatas pada tugas-tugas manajerial dan pelaporan formal, tanpa strategi pembinaan profesional yang sistematis terhadap guru (Suyatno, 2020).

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya penguatan kapasitas yang memadai bagi kepala sekolah dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader). Model kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan instruksional, yang terbukti efektif dalam mendorong perubahan dan membangun budaya belajar di sekolah, belum banyak diterapkan secara luas di sekolah-sekolah pinggiran. Akibatnya, guru PAI di daerah 3T tidak mendapatkan dukungan yang memadai dalam pengembangan diri, supervisi akademik, dan kolaborasi pedagogis.

Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan kepala sekolah yang visioner, adaptif, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Kepemimpinan seperti ini harus mampu menciptakan iklim sekolah yang mendorong inovasi, pembelajaran berkelanjutan, dan pembinaan guru berbasis kebutuhan lokal. Pelatihan kepemimpinan yang menekankan pada dimensi pedagogis dan transformatif perlu menjadi prioritas, agar sekolah di daerah 3T tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan.

3. Governance dalam Pengelolaan Guru PAI

Kepemimpinan sekolah yang efektif telah lama diakui sebagai salah satu pilar utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah yang berperan aktif sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) mampu memberikan arah, inspirasi, dan dukungan nyata kepada guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pendidikan agama, peran ini menjadi sangat krusial karena guru PAI tidak hanya mentransfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan karakter kepada peserta didik. Penelitian menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kualitas kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja guru yang berdampak langsung pada proses dan hasil pembelajaran (Suyatno, 2020).

Namun, realitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam implementasi kepemimpinan pendidikan. Di banyak sekolah, kepala sekolah masih terbatas menjalankan perannya sebagai administrator teknis, fokus pada aspek administratif seperti pengelolaan keuangan, pelaporan program, atau pengisian dokumen sekolah. Fungsi pembinaan akademik sering kali terabaikan, padahal guru-guru di daerah 3T sangat membutuhkan pendampingan profesional, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan tantangan pedagogis yang kompleks. Kondisi ini menghambat terciptanya lingkungan sekolah yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif.

Salah satu penyebab utama dari lemahnya kepemimpinan pembelajaran di daerah 3T adalah belum optimalnya program peningkatan kapasitas kepala sekolah. Model-model kepemimpinan yang terbukti efektif seperti kepemimpinan transformasional yang menekankan pada visi, motivasi, dan perubahan positif serta kepemimpinan instruksional yang fokus pada peningkatan kualitas pengajaran masih jarang dijadikan pendekatan utama dalam pelatihan kepemimpinan di daerah pinggiran. Kepala sekolah yang seharusnya menjadi agen perubahan justru sering merasa terbebani oleh urusan birokrasi tanpa ruang untuk membina guru secara strategis dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan ini, perlu dirancang intervensi yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan pelatihan kepemimpinan sekolah yang kontekstual, yaitu pelatihan yang tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga membangun kapasitas pedagogis kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional. Selain itu, penting untuk menciptakan komunitas belajar kepala sekolah agar terjadi tukar pengalaman, penguatan jejaring, serta saling dukung dalam menjalankan peran strategis mereka. Kepemimpinan yang kuat dan visioner akan menciptakan iklim sekolah yang sehat, inovatif, dan mampu menggerakkan potensi guru, termasuk guru PAI, untuk memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik, meski dalam keterbatasan wilayah 3T.

4. Strategi Perbaikan yang Direkomendasikan

Mengatasi tantangan pendidikan PAI di wilayah 3T memerlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat lokal. Pendekatan sektoral yang

parsial terbukti tidak cukup efektif untuk menjawab permasalahan yang bersifat sistemik, seperti kekurangan guru, rendahnya kompetensi, lemahnya infrastruktur, dan tidak meratanya akses pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menysasar akar permasalahan dari hulu hingga hilir, dengan kerangka kebijakan yang bersifat afirmatif, inklusif, dan kontekstual terhadap karakteristik daerah 3T.

Dalam kerangka tersebut, strategi perbaikan perlu difokuskan pada penguatan aspek distribusi guru, pelatihan yang relevan dengan konteks lokal, peningkatan kapasitas kepemimpinan sekolah, reformasi tata kelola, serta pengembangan program afirmatif berbasis data. Keseluruhan strategi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan PAI yang lebih adil, responsif, dan berkualitas, khususnya di daerah-daerah yang selama ini termarginalkan dalam peta pembangunan pendidikan nasional. Beberapa strategi utama yang dapat dilakukan antara lain:

a. Redistribusi Guru PAI Berbasis Data Spasial

Salah satu strategi utama dalam mengatasi ketimpangan distribusi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di daerah 3T adalah dengan melakukan redistribusi guru berbasis data spasial. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menggunakan data kebutuhan riil seperti rasio guru-murid, kondisi geografis, aksesibilitas wilayah, dan keberadaan satuan pendidikan dalam proses penempatan dan rotasi guru. Dengan menggunakan teknologi pemetaan wilayah dan big data pendidikan, kebijakan redistribusi dapat dilakukan secara lebih objektif dan tepat sasaran, serta menghindari praktik penempatan guru yang tidak mempertimbangkan kebutuhan lapangan.

Penggunaan data spasial juga dapat membantu dalam menyusun mekanisme insentif dan afirmasi yang berbasis lokasi, seperti pemberian tunjangan daerah terpencil, beasiswa ikatan dinas, dan skema rekrutmen khusus guru PAI untuk wilayah 3T. Kebijakan ini sejalan dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020, yang membuka ruang untuk pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan khusus sekolah, termasuk untuk mendukung ketersediaan guru berkualitas di wilayah marginal. Dengan perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), distribusi guru PAI dapat menjadi lebih adil, efisien, dan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran agama di seluruh wilayah Indonesia.

b. Pelatihan Profesional Berbasis Konteks Lokal

Strategi penting berikutnya adalah penyelenggaraan pelatihan profesional guru PAI yang berbasis konteks lokal. Guru di daerah 3T menghadapi tantangan yang berbeda dengan guru di wilayah perkotaan, baik dari sisi budaya, sumber daya, maupun kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, modul pelatihan harus dirancang secara kontekstual, menyesuaikan dengan karakteristik geografis, kultural, dan kebutuhan lokal peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *contextual teaching and learning (CTL)*, di mana guru didorong untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan siswa di lingkungan mereka (Sanjaya, 2011).

Pelatihan semacam ini juga harus memperhatikan keterbatasan infrastruktur, sehingga format pelatihan hibrida atau berbasis komunitas belajar lokal bisa menjadi solusi. Selain meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesional, pelatihan ini juga berperan dalam membentuk *sense of belonging* guru terhadap masyarakat tempat mereka mengabdikan. Dengan begitu, pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar mampu memberdayakan guru untuk berinovasi dalam kondisi terbatas sekalipun. Dukungan dari pengawas, kepala madrasah, dan pemda sangat diperlukan agar pelatihan ini berjalan berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem pembinaan profesi.

c. Kepemimpinan Progresif di Sekolah dan Daerah

Strategi penting lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan PAI di daerah 3T adalah penguatan kepemimpinan progresif di tingkat sekolah dan daerah. Kepemimpinan yang efektif di sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas kepala sekolah sebagai *learning leader* (pemimpin pembelajaran) menjadi hal yang krusial. Kepala sekolah harus dilatih untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu membimbing dan menginspirasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai *learning leader*, kepala sekolah bertanggung jawab dalam menciptakan budaya belajar yang mendukung pengembangan profesionalisme guru dan meningkatkan motivasi mereka untuk berinovasi.

Pelatihan kepala sekolah harus mencakup aspek kepemimpinan transformasional yang memfokuskan pada pemberdayaan guru, pengelolaan perubahan, serta penguatan iklim belajar yang positif di sekolah. Selain itu, kepala sekolah di daerah 3T juga harus memahami konteks lokal agar dapat memberikan arahan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh guru serta peserta didik. Pada tingkat daerah, penting untuk mendorong kepemimpinan kolaboratif antara kepala sekolah dan pengawas PAI, serta menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan. Dengan adanya kepemimpinan progresif yang visioner dan adaptif, sekolah-sekolah di daerah 3T dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga menciptakan generasi yang memiliki integritas moral dan karakter yang kuat.

d. Program Afiriasi Guru PAI 3T

Salah satu strategi yang dapat membantu mengatasi kekurangan guru PAI di daerah 3T adalah dengan meluncurkan program afiriasi untuk rekrutmen khusus guru baru. Program ini dapat dilakukan melalui skema beasiswa pendidikan profesi guru dan ikatan dinas, di mana calon guru PAI yang memenuhi syarat akan diberikan beasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dengan kewajiban mengabdikan di daerah 3T setelah menyelesaikan pendidikan tersebut. Skema ini bertujuan untuk menarik tenaga pengajar yang berkualitas dan berdedikasi untuk mengabdikan di wilayah-wilayah yang sering kali tidak diminati oleh guru-guru dari daerah perkotaan.

Program afirmasi juga dapat mencakup insentif tambahan, seperti tunjangan daerah terpencil dan fasilitas pendukung bagi guru yang bertugas di 3T, seperti penginapan atau alat pembelajaran yang memadai. Selain itu, kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan PPG akan sangat penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan lancar dan dapat memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang membutuhkan. Dengan adanya ikatan dinas, guru-guru yang direkrut tidak hanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional, tetapi juga mendapatkan dukungan finansial yang memadai selama masa tugas mereka di daerah 3T.

Melalui program afirmasi ini, diharapkan distribusi guru PAI dapat menjadi lebih merata dan kualitas pendidikan agama di daerah-daerah yang selama ini terabaikan dapat ditingkatkan secara signifikan. Pendidikan yang berkualitas di daerah 3T akan lebih tercapai apabila ada tenaga pendidik yang memiliki komitmen tinggi untuk membangun generasi yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

e. Sinergi Tata Kelola Antarlembaga

Sinergi tata kelola antarlembaga menjadi faktor kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, terutama dalam pengembangan guru PAI di daerah 3T. Kolaborasi yang erat antara Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta pemerintah daerah perlu diatur dalam sebuah peta jalan yang jelas untuk pengembangan dan pemerataan kompetensi guru PAI di seluruh Indonesia. Sinergi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan pendidikan, rekrutmen guru, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, hingga pendistribusian sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap daerah.

Sebagai contoh, Kemenag dapat mengambil peran dalam merumuskan kurikulum dan materi pelatihan yang sesuai dengan standar pendidikan agama Islam, sementara Kemendikbudristek dapat fokus pada pengembangan kompetensi pedagogis dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan program pendidikan serta mendukung insentif bagi guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Kolaborasi ini dapat dibentuk melalui forum koordinasi antarlembaga yang memastikan bahwa program-program pengembangan guru berjalan secara harmonis dan terintegrasi. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan dapat terwujud pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T, yang selama ini seringkali tertinggal dalam hal sumber daya dan fasilitas pendidikan. Peta jalan yang jelas dalam pengembangan guru PAI akan membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil saling mendukung dan memperkuat, sehingga tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dapat tercapai secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi tantangan serius yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik. Ketimpangan kompetensi guru, lemahnya kepemimpinan pendidikan, minimnya infrastruktur, serta tata kelola yang belum terintegrasi menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan mutu pendidikan PAI. Kekurangan guru tetap, rendahnya akses terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta terbatasnya pelatihan berbasis lokalitas memperparah kesenjangan kualitas antara daerah 3T dan wilayah urban.

Kepemimpinan kepala sekolah yang cenderung administratif serta belum berkembangnya model kepemimpinan instruksional dan transformasional semakin menegaskan perlunya intervensi strategis. Selain itu, belum sinergisnya peran antarlembaga seperti Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan pemerintah daerah dalam distribusi dan pengembangan guru menunjukkan urgensi reformasi tata kelola pendidikan PAI.

Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan strategis yang menyeluruh dan adaptif. Strategi seperti redistribusi guru berbasis data spasial, pelatihan profesional berbasis konteks lokal, kepemimpinan progresif, afirmasi guru PAI 3T, serta sinergi tata kelola lintas sektor adalah langkah konkret yang harus segera diwujudkan untuk menjawab kesenjangan dan menciptakan keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa, termasuk di wilayah 3T.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Fathurrohman, M. (2020). *Model Pembelajaran Inovatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Kemendikbudristek. (2023). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mulyasa, E. (2013). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
- Sanjaya, W. (2011). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Suyatno, et al. (2020). "Kepemimpinan Pendidikan Transformatif dalam Konteks Sekolah Indonesia." *Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Karakter*, 3(1), 15–30.